



**Judul** : Komisi VI Akan Bentuk Panja Minyak Goreng  
**Tanggal** : Senin, 21 Maret 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Dalam Kelangkaan

# Komisi VI Akan Bentuk Panja Minyak Goreng

KOMISI VI DPR akan membentuk panitia kerja (panja) komoditas pangan untuk mengusut polemik kelangkaan minyak goreng. Panja ini sudah disetujui anggota Komisi dan akan segera bekerja pekan depan.

"Sementara ini saya sebagai pimpinan Komisi VI dari Gerindra akan dorong panja segera bekerja minggu depan," ujar Wakil Ketua Komisi VI Muhamad Hekal dalam keterangannya, kemarin.

Hekal mengatakan, jawaban yang disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi ke Komisi VI soal polemik kelangkaan minyak kurang memuaskan.

"Mendag yang pegang *leading* sektor di bidang ini sudah datang ke DPR dan memberikan penjelasan yang cukup mengece-

wakan. Sehingga Komisi VI terpanggil untuk langsung kerja mendalami masalah ini dengan panja," ujar politikus Gerindra ini.

Apalagi, kata Hekal, ketika stok minyak goreng mendadak melimpah saat harga eceran tertinggi (HET) dicabut. "Sangat memalukan setelah dibebaskan *domestic market obligation* (DMO), *domestic price obligation* (DPO), harga eceran tertinggi (HET) dan pungutan ekspor (PE), kurang dari 1 hari barang tiba-tiba melimpah yang sebelumnya langka," keluhnya.

Sementara, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan fraksinya mengusulkan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia. "Insyaallah

surat usulan Hak Angket DPR akan segera dikirimkan kepada Pimpinan DPR," kata Jazuli di Senayan, Jakarta, kemarin.

Jazuli menilai, kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, masalah ini menimbulkan korban jiwa setelah sejumlah masyarakat dikabarkan meninggal saat antre mendapatkan minyak.

Menurut Jazuli, negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sehingga pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah mengatasi persoalan tersebut. "Karena itu Fraksi PKS menempuh jalur konstitusi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengusulkan hak angket dan dibentuknya panitia khusus (pansus)," ujarnya. ■ TIF